

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

Meskipun mencakup aspek penting dari UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dalam konteks kekerasan seksual online, masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan. Pertama, pembahasan cenderung terlalu umum dan kurang fokus pada aspek online dari kekerasan seksual, serta kurang spesifik dalam menganalisis pasal-pasal relevan. Kedua, tidak ada analisis komparatif dengan undang-undang sebelumnya atau praktik internasional. Ketiga, kesimpulan kurang kritis dalam mengidentifikasi potensi kelemahan UU TPKS. Keempat, aspek teknis terkait perkembangan teknologi terbaru kurang dibahas. Kelima, implikasi praktis dan rekomendasi konkret untuk implementasi UU ini dalam sistem peradilan pidana Indonesia tidak diuraikan secara memadai. Keenam, perspektif korban dan konteks sosial-budaya Indonesia dalam kaitannya dengan kekerasan seksual online kurang mendapat perhatian. Untuk meningkatkan kualitas kesimpulan, disarankan untuk menambahkan analisis yang lebih mendalam dan kritis, serta memberikan rekomendasi yang lebih spesifik dan aplikatif dalam konteks kekerasan seksual online di Indonesia.

## **B. Saran**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan langkah signifikan dalam upaya menangani kekerasan seksual di Indonesia, termasuk yang terjadi secara online. Dengan memperluas definisi kekerasan seksual dan mencakup bentuk-bentuk kekerasan di ruang digital, UU ini mencerminkan kesadaran akan perkembangan teknologi dan perubahan pola kejahatan seksual di era digital. Meskipun memberikan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban, implementasi UU TPKS dalam kasus kekerasan seksual online masih menghadapi tantangan, terutama terkait kompleksitas teknologi dan yurisdiksi lintas batas. Diperlukan pengembangan lebih lanjut dalam aspek penegakan hukum, kerjasama lintas sektor dan negara, serta edukasi publik tentang kekerasan seksual online dan literasi digital. UU TPKS membuka peluang untuk pengembangan regulasi turunan yang lebih spesifik, namun evaluasi berkala terhadap efektivitasnya diperlukan untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan perkembangan teknologi dan modus kejahatan yang terus berubah. Dengan demikian, UU TPKS merupakan langkah maju dalam pengaturan kekerasan seksual online di Indonesia, namun masih memerlukan pengembangan dan implementasi lebih lanjut untuk menghadapi tantangan di era digital.